

MODUL AJAR  
PERPAJAKAN



1.	Identitas Sekolah	SMKN 1 JATIREJO
2.	Fase/Kelas	F/XI
3.	Mata Pelajaran	Konsentrasi Keahlian
4.	Elemen	Perpajakan
5.	Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase F peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak, menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun laporan pajak, serta memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).
6.	Profil Pelajar Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia melalui doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran.</li> <li>2. Bergotong royong melalui diskusi dalam menganalisis kasus perhitungan PPh 21.</li> <li>3. Mandiri dalam mengerjakan latihan soal perhitungan.</li> <li>4. Bernalar kritis dalam menganalisis perbedaan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai.</li> <li>5. Kreatif dalam menyajikan hasil penemuan konsep perhitungan.</li> </ol>
7.	Materi pembelajaran	Menghitung Pajak Terutang PPh 21
8.	Sumber belajar	Buku Paket, Modul, Internet dan lainnya

9.	Model Pembelajaran	Model pembelajaran tatap muka
10.	Metode pembelajaran	Eksperimen kecil (simulasi hitung pajak), diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, ceramah interaktif, game kuis, tournament, refleksi
11.	Sarana dan Prasarana	Bahan : Modul ajar, buku tulis, buku paket Alat : Proyektor, LCD, laptop, hp, Jaringan Internet Media : Powerpoint, google form, (aplikasi pembelajaran : youtube, whatsapp, goggle clasroom)
12.	Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar pajak terutang dalam perhitungan PPh Pasal 21.</li> <li>2. Peserta didik mampu mengidentifikasi penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan netto, dan PTKP.</li> <li>3. Peserta didik mampu menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif TER sesuai ketentuan perpajakan.</li> <li>4. Peserta didik mampu menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai.</li> <li>5. Peserta didik mampu menganalisis studi kasus perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat.</li> </ol>
13.	Pemahaman Bermakna	Peserta didik memahami bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara bertahap mulai dari menentukan penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan netto, PTKP, hingga menghitung pajak terutang menggunakan tarif yang berlaku. Ketelitian dalam menghitung PPh Pasal 21 sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.
14.	Pertanyaan Pemantik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa setiap wajib pajak dapat memiliki jumlah pajak terutang yang berbeda?</li> <li>2. Apa perbedaan penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan netto?</li> <li>3. Mengapa PTKP memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar?</li> <li>4. Mengapa perhitungan PPh 21 pegawai tetap berbeda dengan bukan pegawai?</li> <li>5. Apa akibat jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21?</li> </ol>

## 15. Kegiatan Pembelajaran

**Pertemuan 1 (3JPx45 Menit = 135 Menit)**

**Konsep dasar pajak terutang dan dasar pengenaan pajak**

**Model pembelajaran : Discovery Learning**

<b>Tahapan</b>	<b>Deskripsi kegiatan</b>
<b>Kegiatan pendahuluan (15 Menit)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik.</li><li>2. Guru mempersilakan peserta didik untuk membaca do'a.</li><li>3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.</li><li>4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.</li><li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari konsep pajak terutang.</li><li>6. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi konsep dasar pajak terutang.</li><li>7. Guru memberikan pretest melalui google form (5 soal pilihan ganda sederhana).</li></ol>
<b>Kegiatan Inti (100 Menit)</b>	<p><b>Simulation (Pemberian rangsangan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Guru menampilkan 2 studi kasus sederhana di LCD:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasus 1: Andi karyawan, gaji bruto Rp10.000.000/bulan, tarif PPh 21 5%.</li><li>- Kasus 2: Toko Abadi jual barang kena pajak Rp20.000.000 (belum termasuk PPN 11%).</li></ul></li><li>9. Guru bertanya: “Berapa pajak yang harus dibayar Andi? Berapa PPN yang harus dipungut Toko Abadi?” (peserta didik belum dijelaskan rumus).</li></ol> <p><b>Problem statement (Identifikasi masalah)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Guru meminta peserta didik (dalam kelompok 3-4 orang) merumuskan pertanyaan: “Apa yang memengaruhi besar kecilnya pajak yang terutang?”</li><li>11. Setiap kelompok menuliskan dugaan sementara.</li></ol> <p><b>Data Collection</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Guru membagikan Lembar kerja peserta didik yang berisi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tabel data beberapa kasus (penghasilan/nilai transaksi, tarif).</li><li>- Ruang kosong bagi peserta didik untuk menghitung pajak terutang.</li></ul></li><li>13. Peserta didik mencari informasi dari modul/buku/internet tentang DPP dan tarif.</li></ol> <p><b>Data Processing (Pengolahan Data)</b></p>

	<p><b>14.</b> Peserta didik dalam kelompok mengisi tabel pada lembar kerja peserta didik, menemukan pola:  <math>\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}</math></p> <p><b>15.</b> Guru berkeliling membimbing dan membantu peserta didik yang mengalami kendala.</p> <p><b>Verification (Pembuktian)</b></p> <p>16. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas.</p> <p>17. Kelompok lain menanggapi.</p> <p>18. Guru meluruskan jika ada kesalahan konsep.</p> <p><b>Generalization (Menarik Kesimpulan)</b></p> <p>19. Guru memandu peserta didik menyimpulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar untuk menghitung pajak terutang.</li> <li>- Rumus dasar: <math>\text{Pajak Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}</math>.</li> </ul> <p>20. Guru menegaskan perbedaan DPP untuk PPh (penghasilan neto/bruto tertentu) dan PPN (harga jual/impor).</p>
<b>Penutup (20 Menit)</b>	<p>21. Peserta didik mengerjakan posttest yang sudah disediakan guru.</p> <p>22. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini</p> <p>23. Guru memberikan tugas individu berupa mencari contoh kasus nyata terkait materi yang dipelajari hari ini.</p> <p>24. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya.</p> <p>25. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.</p>

Pertemuan 2 (3JPx45 Menit = 135 Menit)

Penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan netto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak.

Model pembelajaran : Discovery Learning

<b>Tahapan</b>	<b>Deskripsi kegiatan</b>
<b>Kegiatan pendahuluan (15 Menit)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik.</li> <li>2. Guru mempersilakan peserta didik untuk membaca do'a.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.</li> <li>4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan</li> </ol>

	<p>perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari konsep pajak terutang.</li> <li>6. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi konsep dasar pajak terutang.</li> <li>7. Guru memberikan pretest melalui google form (5 soal pilihan ganda sederhana).</li> </ol>
<p><b>Kegiatan Inti (100 Menit)</b></p>	<p><b>Simulation (Pemberian rangsangan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Guru menampilkan contoh slip gaji karyawan melalui PowerPoint.</li> <li>9. Guru meminta peserta didik mengamati komponen gaji dan potongan pada slip gaji tersebut.</li> <li>10. Guru memberikan pertanyaan terkait perbedaan antara gaji kotor dan gaji bersih.</li> </ol> <p><b>Problem statement (Identifikasi masalah)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peserta didik mengidentifikasi komponen penghasilan bruto dan pengurangan dari contoh slip gaji yang diberikan.</li> <li>12. Peserta didik mendiskusikan mengapa penghasilan netto setiap karyawan dapat berbeda.</li> <li>13. Peserta didik mengidentifikasi faktor yang memengaruhi besarnya PTKP.</li> </ol> <p><b>Data Collection</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Guru menjelaskan konsep penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan netto, dan PTKP.</li> <li>15. Guru menjelaskan komponen pengurangan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun.</li> <li>16. Peserta didik mencari informasi dari modul dan penjelasan guru mengenai cara menghitung penghasilan netto dan menentukan PTKP.</li> <li>17. Guru membagikan LKPD dan studi kasus sederhana kepada peserta didik.</li> </ol> <p><b>Data Processing (Pengolahan Data)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Peserta didik secara berkelompok menganalisis studi kasus yang diberikan.</li> <li>19. Peserta didik menentukan penghasilan bruto dari kasus yang diberikan.</li> <li>20. Peserta didik menghitung biaya jabatan dan pengurangan lainnya.</li> <li>21. Peserta didik menghitung penghasilan netto berdasarkan data kasus.</li> <li>22. Peserta didik menentukan PTKP sesuai status wajib pajak pada studi kasus.</li> <li>23. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses perhitungan.</li> </ol>

	<p><b>Verification (Pembuktian)</b></p> <p>24. Setiap kelompok mempresentasikan hasil perhitungan penghasilan netto dan PTKP.</p> <p>25. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi.</p> <p>26. Guru memberikan klarifikasi terhadap kesalahan perhitungan yang masih ditemukan.</p> <p><b>Generalization (Menarik Kesimpulan)</b></p> <p>27. Peserta didik bersama guru menyimpulkan tahapan menentukan penghasilan netto dan PTKP.</p> <p>28. Guru memberikan penguatan mengenai pentingnya ketelitian dalam menghitung komponen penghasilan sebelum menentukan pajak terutang.</p>
<b>Penutup (20 Menit)</b>	<p>29. Peserta didik mengerjakan postest yang sudah disediakan guru.</p> <p>30. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini</p> <p>31. Guru memberikan tugas individu berupa mencari contoh kasus nyata terkait materi yang dipelajari hari ini.</p> <p>32. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya.</p> <p>33. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.</p>

Pertemuan 3 (3JPx45 Menit = 135 Menit)

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan tidak tetap

Model pembelajaran : Direct Instruction

<b>Tahapan</b>	<b>Deskripsi kegiatan</b>
<b>Kegiatan pendahuluan (15 Menit)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik.</li> <li>2. Guru mempersilakan peserta didik untuk membaca do'a.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.</li> <li>4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.</li> <li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari konsep pajak terutang.</li> <li>6. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi konsep dasar pajak terutang.</li> </ol>

	<p>7. Guru memberikan pretest melalui google form (5 soal pilihan ganda sederhana).</p>
<p><b>Kegiatan Inti (100 Menit)</b></p>	<p><b>Orientasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Guru menjelaskan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.</li> <li>9. Guru menjelaskan perbedaan karakteristik pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.</li> <li>10. Guru menjelaskan pentingnya ketelitian dalam perhitungan PPh Pasal 21.</li> </ol> <p><b>Demonstrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Guru menjelaskan langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan metode TER dan rekonsiliasi Desember.</li> <li>12. Guru menjelaskan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap (harian, mingguan, dan borongan).</li> <li>13. Guru mendemonstrasikan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap mulai dari penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan netto, PTKP, PKP, hingga pajak terutang.</li> <li>14. Guru mendemonstrasikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap berdasarkan upah harian dan akumulasi penghasilan bulanan.</li> </ol> <p><b>Latihan Terbimbing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Guru memberikan contoh soal perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap.</li> <li>16. Peserta didik mengerjakan perhitungan bersama guru secara bertahap.</li> <li>17. Guru memberikan contoh soal pegawai tidak tetap dengan upah harian.</li> <li>18. Peserta didik mengerjakan latihan bersama guru dengan bimbingan langkah demi langkah.</li> <li>19. Beberapa peserta didik diminta menuliskan hasil perhitungannya di papan tulis.</li> </ol> <p><b>Latihan mandiri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Guru membagikan LKPD berisi studi kasus pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.</li> <li>21. Peserta didik menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan kasus yang diberikan secara individu.</li> <li>22. Guru berkeliling membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses perhitungan.</li> </ol> <p><b>Cek pemahaman</b></p>

	<p>23. Guru membahas jawaban LKPD bersama peserta didik.</p> <p>24. Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil perhitungan.</p> <p>25. Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi.</p> <p>26. Guru meluruskan kesalahan perhitungan yang masih ditemukan dan memberikan penguatan materi.</p>
<b>Penutup (20 Menit)</b>	<p>27. Peserta didik mengerjakan postest yang sudah disediakan guru.</p> <p>28. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini</p> <p>29. Guru memberikan tugas individu berupa mencari contoh kasus nyata terkait materi yang dipelajari hari ini.</p> <p>30. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya.</p> <p>31. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.</p>

Pertemuan 4 (3JPx45 Menit = 135 Menit)

Perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai

Model pembelajaran : Direct Instruction

<b>Tahapan</b>	<b>Deskripsi kegiatan</b>
<b>Kegiatan pendahuluan (15 Menit)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik.</li> <li>2. Guru mempersilakan peserta didik untuk membaca do'a.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.</li> <li>4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.</li> <li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari konsep pajak terutang.</li> <li>6. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi konsep dasar pajak terutang.</li> <li>7. Guru memberikan pretest melalui google form (5 soal pilihan ganda sederhana).</li> </ol>
<b>Kegiatan Inti (100 Menit)</b>	<p><b>Orientasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Guru menjelaskan pengertian bukan pegawai dalam PPh Pasal 21.</li> </ol>

	<p>9. Guru menjelaskan contoh penerima penghasilan bukan pegawai seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, influencer, dan pembicara seminar.</p> <p>10. Guru menjelaskan pentingnya ketelitian dalam menentukan dasar pengenaan pajak bagi bukan pegawai.</p> <p><b>Demonstrasi</b></p> <p>11. Guru menjelaskan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.</p> <p>12. Guru menjelaskan dasar pengenaan pajak bagi bukan pegawai sebesar 50% dari penghasilan bruto.</p> <p>13. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai menggunakan tarif Pasal 17.</p> <p>14. Guru memberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium jasa tenaga ahli.</p> <p><b>Latihan Terbimbing</b></p> <p>15. Guru memberikan satu contoh soal perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai.</p> <p>16. Peserta didik mengerjakan latihan bersama guru secara bertahap mulai dari menentukan penghasilan bruto hingga pajak terutang.</p> <p>17. Guru membimbing peserta didik dalam setiap langkah perhitungan.</p> <p>18. Beberapa peserta didik diminta menuliskan hasil perhitungan di papan tulis.</p> <p><b>Latihan mandiri</b></p> <p>19. Guru membagikan LKPD berisi studi kasus perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai.</p> <p>20. Peserta didik menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan studi kasus secara individu.</p> <p>21. Guru berkeliling membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses perhitungan.</p> <p><b>Cek pemahaman</b></p> <p>22. Guru membahas jawaban LKPD bersama peserta didik.</p> <p>23. Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil perhitungannya.</p> <p>24. Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi.</p> <p>25. Guru meluruskan kesalahan perhitungan yang masih ditemukan serta memberikan penguatan materi.</p>
<b>Penutup (20 Menit)</b>	26. Peserta didik mengerjakan posttest yang sudah disediakan guru.

	<p>27. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini</p> <p>28. Guru memberikan tugas individu berupa mencari contoh kasus nyata terkait materi yang dipelajari hari ini.</p> <p>29. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya.</p> <p>30. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.</p>
--	--

#### 16. Penilaian Pembelajaran (ASSESSMENT)

- Penilaian tertulis : dilakukan melalui pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi PPh 21.
- Penilaian performa : melalui presentasi hasil diskusi kelompok dan kemampuan menghitung studi kasus PPh 21, dengan rubrik yang menilai ketepatan hitung, penyajian data, kemampuan presentasi, dan kerja sama kelompok.
- Penilaian sikap : melalui observasi selama pembelajaran, meliputi keaktifan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kesopanan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.

#### 17. Pengayaan

Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM berupatantangan soal kompleks, penyusunan simulasi SPT Masa PPh 21, serta pembuatan infografis atau video prosedur pemotongan pajak.

#### 18. Remedial

Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM melalui bimbingan langsung, latihan soal bertahap, dan pengulangan tes dengan materi sejenis hingga mencapai batas ketuntasan.

#### 19. Refleksi Guru

Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, dengan minta pendapat tentang cara mengajar, suasana pembelajaran, pemahaman pembelajaran ataupun meminta kritik dan saran kepada peserta didik terhadap pembelajaran dan dirinya. Hal ini dapat dilakukan menjelang pembelajaran berakhir sehingga tidak mengganggu pembelajaran.

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran PPh 21 dengan baik?  
.....  
.....
2. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi yang saya sajikan? (Apakah materi terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sesuai dengan kemampuan awal peserta didik?)  
.....  
.....

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran seperti PowerPoint, studi kasus, dan video simulasi perhitungan PPh 21? Apakah media tersebut sesuai dan mempermudah peserta didik menguasai kompetensi perhitungan PPh 21?

.....  
.....

4. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya rancang, seperti diskusi kelompok, simulasi hitung pajak, dan latihan soal studi kasus pegawai tetap, tidak tetap, maupun bukan pegawai?

.....  
.....

## 20. Refleksi Peserta Didik

Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna untuk kalian, yuk sejenak refleksi tentang aktivitas pembelajaran PPh 21 ini.

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mempelajari materi ini!

Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini!

 **Senang**     **Biasa Saja**     **Kurang Senang**

1. **Apa yang sudah kalian pelajari dari materi PPh 21?**

.....  
.....

2. **Apa yang kalian kuasai dari materi perhitungan PPh 21 ini?**

.....  
.....

3. **Bagian apa yang belum kalian kuasai?**

.....  
.....

4. **Apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai?**

.....  
.....

5. **Kritik dan saran untuk guru agar pembelajaran PPh 21 ke depannya lebih baik lagi?**

.....  
.....

## Lampiran

### 1. Materi PPh 21

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

1. Pemotong PPh Pasal 21 : pemberi kerja, bendahara pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan Perusahaan yang membayar honorarium.
2. Penerima penghasilan (pegawai) : pegawai tetap, pegawai tidak tetap/tenaga lepas, bukan pegawai, dan penerima pensiun.

#### B. Penghasilan bruto

Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari pekerjaan, usaha, maupun kegiatan lainnya, sebelum dikurangi biaya-biaya.

Komponen penghasilan bruto pegawai tetap : Gaji pokok, Tunjangan (tunjangan jabatan, transport, makan, perumahan, dll), Bonus dan THR (Tunjangan Hari Raya), premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, lembur dan honorarium.

#### C. Pengurangan yang Diperbolehkan Secara Fiskal

1. Biaya jabatan : Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M). Bersifat fiktif/standar, diberikan tanpa bukti pengeluaran riil. 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal: Rp500.000 per bulan dan Rp6.000.000 per tahun.  
Contoh : Gaji Rp8.000.000  $\rightarrow$   $5\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}400.000$  (dibawah batas, pakai Rp400.000)
2. Iuran pensiunan : Iuran yang dibayarkan karyawan ke dana pensiun yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Iuran pensiun yang dibayar karyawan sendiri (bukan oleh perusahaan) menjadi pengurang penghasilan bruto.  
Contoh : Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% dari gaji yang dibayar karyawan.
3. Pengurangan lain (Dalam kondisi tertentu)  
Zakat/sumbangan keagamaan(bagi WP yang terbukti membayar).

#### D. Penghasilan Netto

Penghasilan netto didapatkan dari :

Penghasilan Netto Sebulan = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun.

Penghasilan Netto Setahun = Penghasilan Netto Sebulan  $\times$  12 (untuk pegawai bekerja penuh setahun)

Untuk pegawai yang bekerja tidak penuh setahun (misal mulai kerja Maret), penghasilan netto disetahunkan menggunakan rumus pro-rata.

## E. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan neto setahun di bawah PTKP tidak wajib membayar PPh 21.

Berikut besaran PTKP :

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000,-
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000,-
Kawin Dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000,-
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000,-
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000,-
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000,-

Jumlah tanggungan maksimal 3 orang (anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau orang tua. Tanggungan anak yang lahir di tahun berjalan TIDAK otomatis menambah PTKP untuk tahun tersebut. Status PTKP ditentukan berdasarkan kondisi per 1 Januari tahun pajak. Untuk wanita kawin, status PTKP pada dasarnya adalah TK/0, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan bahwa ia menanggung biaya hidup suami dan anak.

## F. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP Setahun = Penghasilan Neto Setahun – PTKP

Pembulatan PKP: Dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh (Rp1.000,00).

Catatan: Jika PKP bernilai negatif (penghasilan neto < PTKP), maka tidak ada PPh terutang.

## G. Tarif pajak

### 1. Pegawai tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu.

a. Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh (Untuk Rekonsiliasi Desember)

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp0 - 50 juta	5%	Rp0 - 60 juta	5%
II	> Rp50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	> Rp250 - 500 juta	25%	> Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V	-	-	> Rp5 miliar	35%

## Rumus PPh Setahun (Pasal 17):

$PPh = (Rp60.000.000 \times 5\%) + (PKP \text{ selanjutnya} \times \text{tarif berikutnya sesuai lapisan})$

b. Tarif Efektif Rata-rata (TER) – Berlaku Januari s.d November

**CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA**

23

**Tuan R** pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

**PERHITUNGAN BULANAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA**

Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp112.800.000,00
12 x Rp9.400.000,00	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	Rp 3.715.000,00
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	Rp2.715.000,00 : 12
	<b>Rp 226.250,00</b>

**PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF**

Jan – Nov : 2% x Rp10.000.000,00 = **Rp200.000,00** / bulan  
 Des : Rp2.715.000,00 – (11 x Rp200.000,00) = **Rp515.000,00**

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	Pph setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)		Ket.
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif Jan-Des	
Tuan R	10.000.000	7.715.000	226.250	200.000	515.000

Cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif **lebih sederhana dan beban pajak untuk setahun tidak berbeda** dibandingkan ketentuan sebelumnya

www.pajak.go.id

### TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	34,00%

### TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d. 161.000.000	26,00%
33	161.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	34,00%

### TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	34,00%

$\text{PPh Potongan Bulanan} = \text{Penghasilan Bruto Bulanan} \times \text{Tarif TER}$   
(sesuai kategori dan lapisan)

## 2. Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

**SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP**

Tarif Pegawai Tidak Tetap Ketentuan Sebelumnya	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450rbu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph.Bruto - PTKP sehari)
> Rp10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph.Bruto - PTKP)

  

Tarif Pegawai Tidak Tetap PMK-168/2023	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
<= Rp450rbu/hari	0% x Ph.Bruto Harian
> Rp450rbu/hari - Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph.Bruto Harian
> Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph.Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph.Bruto

**Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Tidak Secara Bulanan**

**Penghasilan dengan jumlah ≤ Rp2.500.000,00 Sehari**

Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama **10 hari**. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar Rp4.500.000,00 : 10 = **Rp450.000,00**.  
**Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : 0% x Rp450.000,00 = Rp0**  
**Catatan:** PT O tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).

**Penghasilan dengan jumlah > Rp2.500.000,00 Sehari**

Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak **10 buah dalam sehari** dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.  
**Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00**

## H. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21 Bukan Pegawai

PPh Pasal 21 bukan pegawai adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang tidak memiliki hubungan kerja tetap dengan pemberi penghasilan.

Bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan hubungan kerja tetap, namun terdapat hubungan kerja dalam kedudukan yang setara.

### I. Jenis-jenis bukan pegawai

1. Tenaga ahli : Dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, konsultan, penilai
2. Pemain music, pembawa acara : Musisi, MC, bintang iklan, bintang film.
3. Agen Asuransi
4. Sales, distributor,
5. Penerima honorarium : Narasumber, moderator, pembicara

### J. Klasifikasi bukan pegawai

1. Berkesinambungan : Menerima penghasilan lebih dari satu kali dalam satu tahun Kalender
2. Tidak berkesinambungan : Menerima penghasilan hanya satu kali dalam satu tahun Kalender

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Lama)	
Kondisi	Tarif
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan: • memiliki NPWP • hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan • tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif)
Berkesinambungan: • tidak memiliki NPWP; atau • memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)

↓

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru *)	
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)	

\*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

## K. Perhitungan PPh 21 bukan pegawai

### Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Yang Melakukan Praktik Di Rumah Sakit Dan/Atau Klinik (Lanjutan)

43

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.

### Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Sehubungan Dengan Pemberian Jasa, Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya Dan/ Atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan

44

Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar **Rp10.000.000,00**. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan **upah sebesar Rp4.500.000,00** dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga **Rp1.000.000,00**, sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT E dan dibuktikan dengan **faktur tagihan** dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V.

#### Penghitungan PPh Pasal 21:

- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai, **tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen** yang diserahkan oleh Tuan V.
- Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:  $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - (\text{Rp}4.500.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}2.250.000,00$
- Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:  $5\% \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}112.500,00$

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Kelas** : \_\_\_\_\_

**Kelompok** : \_\_\_\_\_

**Tanggal** : \_\_\_\_\_

### PERTEMUAN 1&2

Amatilah dua studi kasus berikut yang ditampilkan oleh guru!

#### **Kasus 1 :**

Andi adalah seorang karyawan. Setiap bulan Andi menerima gaji bruto sebesar Rp10.000.000. Tarif PPh 21 yang dikenakan adalah 5%.

#### **Kasus 2 :**

Toko Abadi menjual barang kena pajak dengan harga Rp20.000.000 (belum termasuk PPN). Tarif PPN adalah 11%.

Pertanyaan :

1. Berapa pajak yang harus dibayarkan Andi?
2. Berapa PPN yang harus dipungut Toko Abadi?

#### A. Identifikasi Masalah

Bersama kelompok Anda (3-4 orang), rumuskan pertanyaan tentang "**Apa yang memengaruhi besar kecilnya pajak yang terutang?**"

Tuliskan minimal 3 pertanyaan hasil diskusi kelompok!

#### B. Pengumpulan Data

Carilah informasi dari modul, buku paket, atau internet tentang istilah-istilah berikut!

No	Istilah	Pengertian
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
2	Tarif Pajak	
3	Pajak Terutang	

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Kelas** : \_\_\_\_\_

**Kelompok** : \_\_\_\_\_

**Tanggal** : \_\_\_\_\_

### PERTEMUAN 3

1. Tn. Joko (K/4) pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap pada PT MAKMUR SENTOSA dengan memperoleh gaji sebesar Rp.15.000.000 / bulan. Selain itu ia juga menerima tunjangan berupa beras setiap bulan yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 150.000. PT MAKMUR SENTOSA mengikuti program JAMSOSTEK dan membayarkan premi asuransi kesehatan dan premi kecelakaan kerja masing masing sebesar Rp. 150.000 dan Rp. 200.000 setiap bulan. luran pensiun dan iuran Tabungan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh Tn. Joko masing-masing sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 160.000 setiap bulan. Hitunglah berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT MAKMUR SENTOSA atas penghasilan Tn. Joko setiap bulan !!!
2. Tn. Bahtiar (K/2) pada tahun 2019 adalah seorang karyawan tetap pada PT. RAHAYU SENTOSA dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 10. 000.000 setiap bulan. PT RAHAYU SENTOSA mengikuti program JAMSOSTEK dan membayarkan premi asuransi kesehatan dan premi kecelakaan kerja masing-masing sebesar 5% dan 4% dari gaji pokok setiap bulan. luran pensiun dan iuran Tabungan Hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh Tn. Bahtiar masing-masing sebesar 3% dan 5% dari gaji pokok setiap bulan. Hitunglah berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT RAHAYU SENTOSA atas penghasilan Tn Bahtiar setiap bulan!
3. Teja status kawin dengan 1 anak adalah pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2019. Mulai tahun 2015 Teja menerima pensiun sebulan Rp. 5.000.000,-. Berapa PPh ps.21 yg harus dipotong atas uang pensiun Teja setiap bulan ?

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Kelas** : \_\_\_\_\_

**Kelompok** : \_\_\_\_\_

**Tanggal** : \_\_\_\_\_

### PERTEMUAN 4

1. Dr. Andi Prakoso, Sp.PD (dokter spesialis penyakit dalam) diminta menjadi narasumber dalam seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh RS Harapan Sehat. Atas jasanya tersebut, Dr. Andi menerima honorarium sebesar Rp75.000.000 (sudah termasuk PPh 21). Dr. Andi memiliki NPWP.

Pertanyaan:

Hitunglah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh RS Harapan Sehat!

2. Ibu Sarah Wijaya, S.E., Ak., CA adalah seorang akuntan publik yang memiliki kantor sendiri. Beliau ditunjuk oleh PT Maju Jaya sebagai konsultan keuangan dengan imbalan Rp35.000.000 setiap bulan (dibayarkan setiap tanggal 5). Perjanjian berlaku untuk periode Januari s.d Desember 2026. Ibu Sarah memiliki NPWP.

Pertanyaan:

Hitunglah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya setiap bulannya!